

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kinerja perekonomian suatu negara umumnya diukur oleh beberapa indikator ekonomi yang bisa mencerminkan tingkat kegiatan ekonomi di masyarakat. Perkembangan indikator-indikator ini tidak saja dapat berpengaruh pada tingkat stabilitas ekonomi, tetapi juga pada tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu indikator ekonomi terpenting adalah pertumbuhan ekonomi, yang untuk pencapaiannya tidak saja dipengaruhi oleh tersedianya pembiayaan yang memadai, tetapi juga oleh masalah distribusi sumber daya yang ada (Masniadi, 2012).

Investasi atau penanaman modal merupakan salah satu langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Investasi adalah komponen pembentuk nilai tambah nasional yang merupakan pembelian barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian nasional. Meningkatnya kegiatan perekonomian sangat tergantung kepada aliran modal bagi usaha produktif (Syahputra, 2017).

Teori ekonomi tentang investasi merupakan pengeluaran–pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama untuk menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa

yang akan datang. Dengan kata lain investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi sesuatu perekonomian (Syahputra, 2017).

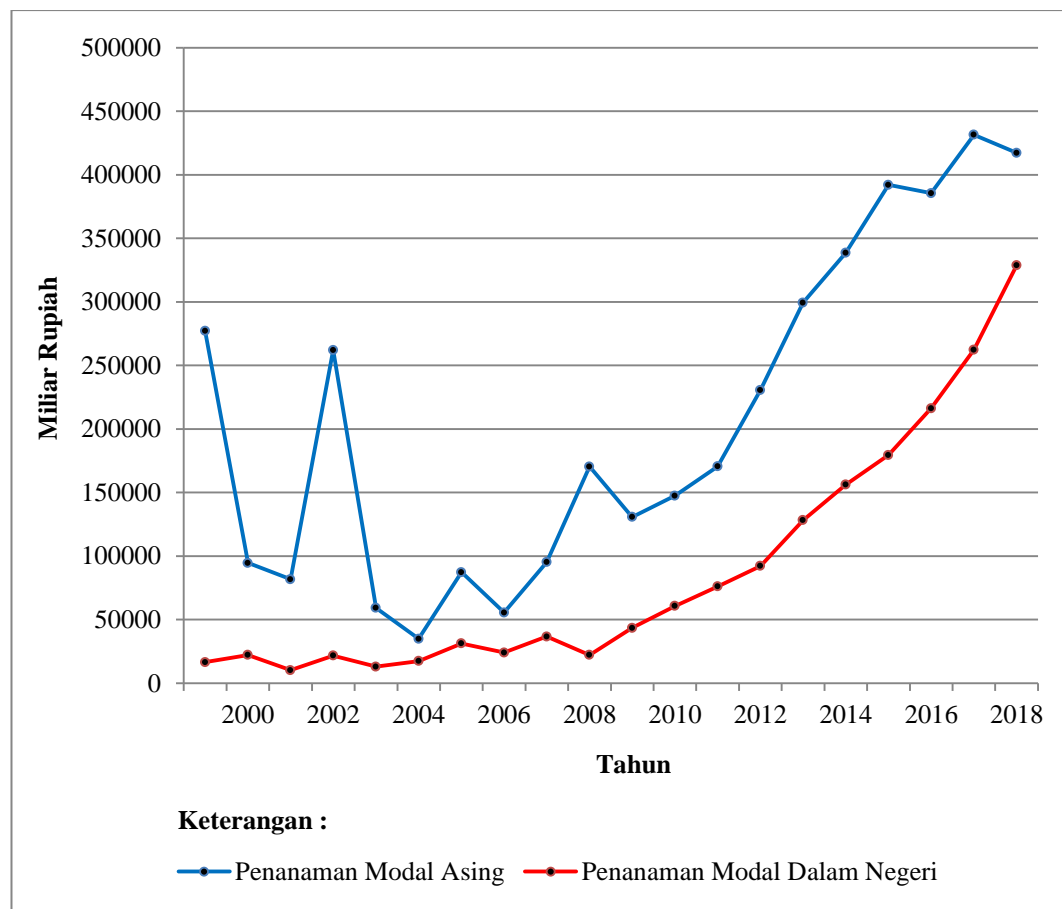
Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang. Sebagai negara berkembang, permasalahan yang selalu dihadapi adalah permasalahan pembangunan ekonomi. Pembiayaan yang sangat besar diperlukan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan ekonomi yang telah dilakukan negara-negara maju. Penanaman modal dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan untuk menutup keterbatasan pembiayaan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Menurut Mudrajad (2000), akumulasi modal sangat dibutuhkan oleh suatu negara untuk membangun kinerja perekonomiannya. Untuk itu negara berusaha untuk menciptakan iklim perekonomian yang dapat mendorong pertumbuhan akumulasi modal yang diperlukan untuk pembangunan perekonomian (Thirafi, 2013).

Penghimpunan dana yang dilakukan berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi diharapkan sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian Indonesia. Karena terbatasnya dana yang dimiliki pemerintah, untuk menggerakkan pembangunan ekonomi maka peran investasi dari luar negeri (PMA) sangat diharapkan. Penanaman modal asing atau investasi asing dianggap lebih menguntungkan karena tidak memerlukan kewajiban pengembalian kepada pihak asing seperti halnya hutang luar negeri (Thirafi, 2013).

Grafik I.1 menunjukkan data perkembangan realisasi investasi swasta di Indonesia baik dalam bentuk penanaman modal asing (PMA) ataupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) tahun 1997-2018.

Grafik I-1

Realisasi Investasi Swasta di Indonesia Tahun 1997-2018



Sumber : (National Single Window for Investmen, 2019)

Investasi swasta dalam bentuk penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri terus mengalami fluktuasi dari tahun 1997-2018 dengan nilai dan tren yang bervariasi. Nilai tertinggi untuk penanaman modal asing (PMA) terjadi pada tahun 2017 dan terendah pada tahun 2004 dengan nilai masing-

masing sebesar 431.394 miliar rupiah dan 34.890 miliar rupiah. Sedangkan nilai tertinggi untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) terjadi pada tahun 2018 dan terendah pada tahun 2001 dengan nilai masing-masing sebesar 328.604 miliar rupiah dan 10.104 miliar rupiah.

Menurut Dumairy (1997), untuk mendapat gambaran mengenai perkembangan investasi dari waktu ke waktu, ada dua macam cara yang bisa dilakukan. Pertama, dengan menyoroti kontribusi pembentukan modal domestik bruto dalam konteks permintaan agregat, yakni melihat sumbangan dan perkembangan Variabel investasi (I) dalam identitas pendapat nasional $Y = C + I + G + X - M$. Data investasi merupakan data keseluruhan investasi domestik secara bruto, meliputi baik investasi oleh swasta (PMDN + PMA) maupun oleh pemerintah. Cara kedua adalah dengan mengamati data-data PMDN dan PMA. Grafik I-1 diatas menunjukkan realisasi PMA lebih tinggi daripada PMDN, hal tersebut mengindikasikan bahwa investasi swasta yang masuk ke Indonesia didominasi oleh perusahaan-perusahaan luar negeri.

Krisis keuangan tahun 1998 memberikan dampak terhadap penurunan realisasi PMA di Indonesia dari tahun 1999 sampai 2000 yaitu sebesar 277.016 miliar rupiah menjadi 94.495 miliar rupiah. Penurunan realisasi PMA yang besar juga terjadi pada tahun 2002-2003 yaitu sebesar 262.077 miliar rupiah menjadi 59.141 miliar rupiah. Berbeda dengan PMA yang menurun karena adanya krisis keuangan, realisasi PMDN pada tahun 1999-2000 justru mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu besar yaitu dari 16.429 miliar rupiah menjadi 22.090 miliar rupiah. Hal tersebut dikarenakan krisis keuangan tahun 1998 merupakan krisis

yang disebabkan oleh gangguan keuangan internasional, sehingga akan lebih berdampak pada investor asing (PMA) daripada investor domestik (PMDN).

Daerah di seluruh dunia harus berupaya untuk menciptakan suatu iklim yang kondusif untuk mendorong iklim investasi agar mampu menarik investor menjadi sumber pembiayaan pembangunan. Menurut studi yang dilakukan *Asian Development Bank* (2005) ada 3 faktor utama yang mampu menghasilkan iklim investasi yaitu kondisi ekonomi makro, kelembagaan, dan infrastruktur. Sukirno (2002), mengatakan bahwa tingkat suku bunga adalah faktor yang menentukan besar kecilnya investasi yang dilakukan oleh masyarakat (swasta). Suku bunga yang tinggi dapat merupakan hambatan bagi pertumbuhan sektor swasta maupun publik. Oleh karena itu suku bunga rendah merupakan syarat penting untuk mendorong investasi swasta (Syahputra, 2017).

Selain dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, investasi juga dipengaruhi oleh laju inflasi dan upah tenaga kerja. Tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan barang dan jasa menjadi kurang kompetitif yang menyebabkan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan akan menurun, pada akhirnya akan menghambat investasi baru (Septifany, 2015). Investasi asing langsung meningkatkan permintaan tenaga kerja trampil yang mengarah ke peningkatan pangsa dari total upah perusahaan. Upah tenaga kerja yang rendah akan menurunkan biaya produksi yang relatif rendah, dengan demikian mengurangi beban biaya dan akan meningkatkan laba perusahaan, sehingga investor melirik potensi dan meningkatkan investasinya (Dewata, 2013).

Nilai tukar dan kualitas infrastruktur juga merupakan faktor yang mendorong perbaikan iklim investasi. Letarisky (2014) mengungkapkan bahwa pada sisi permintaan, jika dilihat dalam jangka pendek, disaat nilai tukar mata uang domestik melemah maka akan terjadi pengaruh secara negatif pada *absorbs domestic* (tingkat konsumsi domestik). Jika hal ini terjadi, maka pendapatan perusahaan akan semakin berkurang dan investornya menjadi enggan untuk berinvestasi. Nilai tukar juga sangat penting bagi para investor yang memiliki tujuan untuk mengekspor barang-barang yang telah diproduksi. Thirafi (2013) mengungkapkan bahwa wilayah dengan kondisi infrastruktur yang baik seperti transportasi, telekomunikasi, listrik, dan air akan juga menarik investor untuk menanamkan modalnya atau mendirikan usaha di wilayah tersebut.

Sasana (2008) menunjukkan bahwa suku bunga berpengaruh negatif terhadap investasi swasta dan pengeluaran pemerintah, sementara inflasi berpengaruh positif terhadap investasi swasta di Jawa Tengah.

Syahputra (2017) menemukan dalam jangka panjang tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap investasi swasta di Indonesia. Dalam jangka pendek PDB dan tingkat suku bunga riil yang berpengaruh terhadap investasi swasta di Indonesia.

Dewata (2013) memperlihatkan bahwa total ekspor berpengaruh positif dan signifikan, sementara LIBOR dan upah tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap investasi asing langsung di Indonesia tahun 1990-2012.

Di kabupaten Kendal, Thirafi (2013) menemukan dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan, sedangkan ketersediaan tenaga kerja yang di-*proxy* oleh angkatan kerja, infrastruktur dan kepadatan penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PMA di Kabupaten Kendal.

Berdasarkan latar belakang di muka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana arah dan besarnya pengaruh jangka panjang dan jangka pendek variabel tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar, infrastruktur, upah tenaga kerja, dan investasi pemerintah terhadap investasi swasta di Indonesia tahun 1997-2018

B. Rumusan Masalah

Bagaimana arah dan besarnya pengaruh jangka panjang dan jangka pendek variabel tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar, upah tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah terhadap investasi swasta di Indonesia tahun 1997-2018.

C. Tujuan Penelitian

Menganalisis bagaimana arah dan besarnya pengaruh jangka panjang dan jangka pendek variabel tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar, upah tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah terhadap investasi swasta di Indonesia tahun 1997-2018

D. Manfaat Penelitian

Membuktikan secara empiris hubungan antara variabel ekonomi makro yang akan diuji yaitu investasi swasta dengan indikator tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar, upah tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah di Indonesia.

Memberikan informasi atau referensi bagi pembaca yang berkaitan dengan penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Indonesia. Selain itu, hasilnya diharapkan dapat menghasilkan saran dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan guna menetapkan kebijakan dalam rangka menjaga iklim investasi di Indonesia

E. Metode Penelitian

1. Alat dan Model Penelitian

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi OLS (*Ordinary Least Squares*). Adapun model ekonometriknya diformulasikan sebagai berikut :

$$\log INV_t = \beta_0 + \beta_1 R_t + \beta_2 P_t + \beta_3 \log ER_t + \beta_4 \log WAGE_t + \beta_5 \log GE_t$$

Keterangan :

INV = Investasi Swasta

R = Suku Bunga

P = Inflasi

ER = Nilai Tukar Rupiah terhadap US\$

$WAGE$	=	Upah Tenaga Kerja
GE	=	Pengeluaran Pemerintah
ε_t	=	Unsur Kesalahan
t	=	Tahun

2. **Data dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk data urutan waktu (*time series*). Penelitian ini menggunakan data investasi swasta, suku bunga, inflasi, nilai tukar, upah tenaga kerja, pengeluaran pemerintah di Indonesia periode 1997 sampai 2018. Data diperoleh dari *World Bank*, *World Global Competitive Report*, Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab dengan urutan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi teori-teori yang mendukung penelitian ini yaitu teori investasi swasta, serta berisi penelitian-penelitian sebelumnya dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang data dan sumber data. Metode pengumpulan data, definisi operasional variabel dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang deskripsi data, analisis data, hasil analisis dan pembahasannya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang perlu disampaikan baik objek maupun penelitian sebelumnya.